

KERJA SAMA PROYEK LESTARI DALAM MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DI KATINGAN-KAHAYAN

Ori Pranata Tanjung¹

Abstract: *This study aims to explain the implementation of USAID's cooperation with Indonesia in reducing greenhouse gas emissions through the LESTARI project which is viewed from the Indonesian national interest. The method in this research is descriptive. The data collection technique used is library technique with secondary data sources from books, mass media, journals, internet, and other sources. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that the LESTARI Program worked closely with the Indonesian government in implementing programs to reduce greenhouse gas emissions through various collaborations, especially at the regional level with a focus on several landscapes that are LESTARI's concerns with Katingan-Kayahan Landscape as the main focus of the research. LESTARI interventions can continue to support the planning and policy-making process through the Landscape Conservation Plan. Furthermore, to garner important community support for landscape governance, the Multi Stakeholder Forum will continue to be an effective community-based institution to influence government agencies, private parties and local communities to be more responsible and have better coordination.*

Keywords: *USAID, Indonesia, Collaboration, LESTARI, Greenhouse Gas Emissions*

Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi salah satu masalah paling serius yang di hadapi negara-negara dunia. Ancaman terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan oleh perubahan iklim menyebabkan kekhawatiran kepada masyarakat. Salah satu penyebab terbesar perubahan iklim selain peristiwa alam adalah efek emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama yang berasal dari Karbon Dioksida (CO₂) (EPA, 2020) yang berupa hasil dari penggunaan bahan bakar fosil serta dampak langsung dari kegiatan manusia dalam sektor kehutanan, seperti deforestasi, pembukaan lahan untuk pertanian, dan degradasi tanah.

Konsentrasi emisi gas rumah kaca telah meningkat drastis sejak revolusi industri tahun 1800-an dari sebesar 28.09 juta ton hingga 36.44 milyar ton pada tahun 2019 dari pembakaran bahan bakar fosil (Ritchie & Roser, 2020). Peningkatan ini juga dikarenakan kemajuan teknologi yang diikuti oleh industrialisasi besar-besaran di negara maju di Eropa dan Amerika (EPA, 2020), hal tersebut juga memancing negara-negara berkembang yang sedang membangun ekonominya untuk melakukan industrialisasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi dampak buruk terhadap lingkungan atas modernisasi kegiatan manusia, negara-negara di dunia berinisiatif untuk melakukan mitigasi atas kerusakan lingkungan. Salah satu inisiatif dunia tersebut adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang merupakan perpanjangan dari *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) 1992 yang mengikat negara-negara pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, berdasarkan konsensus ilmiah

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail:

bahwa pemanasan global sedang terjadi dan sangat mungkin bahwa emisi CO₂ buatan manusia telah menjadi penyebab utamanya (UNFCCC, 2021). Protokol Kyoto diadopsi di Kyoto, Jepang pada 11 Desember 1997 dan berlaku per tanggal 16 Februari 2005.

Periode komitmen pertama dari Konvensi Kyoto dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2012. Ke-36 negara yang berkepentingan dalam kerangka waktu komitmen pertama berpegang teguh pada Konvensi ini. Namun, sembilan negara harus menggunakan komponen adaptasi dengan memberikan bantuan finansial untuk mendukung penurunan emisi di negara lain karena emisi nasional dari Sembilan negara ini sedikit lebih tinggi dari target mereka. Krisis keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2008 juga mendukung pengurangan emisi.

Periode komitmen kedua disepakati pada tahun 2012, yang disebut sebagai Amandemen Doha pada Protokol Kyoto, dimana 37 negara memiliki target bersifat mengikat. Hingga Oktober 2020, 147 negara telah mengakui Amandemen Doha. Amandemen ini dilaksanakan pada 31 Desember 2020, setelah setidaknya diakui oleh 144 negara. Dari 37 pihak yang memiliki tanggung jawab mengikat, 34 telah dikonfirmasi. Kesepakatan antar negara juga akan dilakukan dalam struktur UNFCCC tahunan tentang cara-cara yang akan diambil setelah periode berikutnya ditutup pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan diterimanya *Paris Agreement* 2015, yang merupakan instrumen berbeda di bawah UNFCCC.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyadari dampak buruk industrialisasi terhadap lingkungan, menandatangani pula Protokol Kyoto dan juga tergabung *Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change* dimana Indonesia adalah salah satu negara yang mengesahkan konvensi ini sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 22 April 2016 (PPID Kementerian LHK, 2021), dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016 (BPK, 2020). Di dalam pertemuan tersebut, negara-negara di dunia secara bersama berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu bumi lebih jauh ke 1,5°C di atas tingkat pra industri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan mengalami berbagai macam perubahan iklim, sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. dengan urutan keempat dari seluruh dunia per tahun 2015 lalu (Dune, 2020). Kenaikan tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan negara baik dari berbagai sektor nasional hingga emisi alami yang dihasilkan oleh kebakaran hutan adalah kontributor emisi gas rumah kaca di Indonesia.

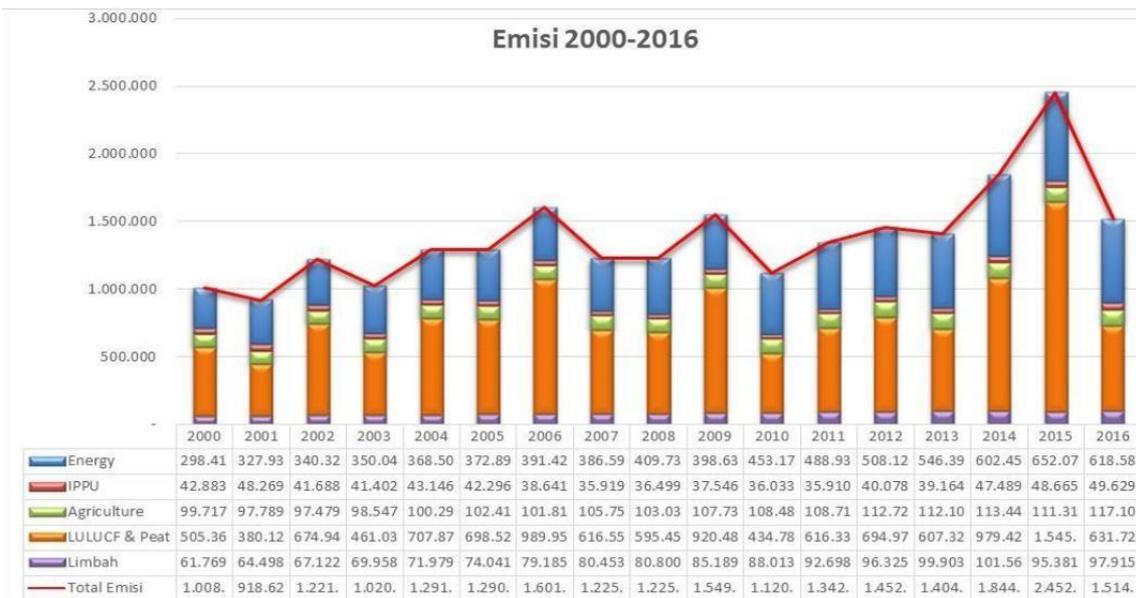
Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengutamakan agenda yang berkaitan dengan pemeliharaan hutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk sampai pada tujuan Paris Agreement, Indonesia memberikan kontribusi berupa menurunkan emisi pada tahun 2030 dari jumlah minimal yang diatur secara nasional yang kemudian disebut *Nationally Determined Contribution* (NDC) (UNFCCC, 2020). NDC telah tersebut mencakup aspek mitigasi, adaptasi dan dukungan sumber daya seperti pendanaan, peningkatan kemampuan dan alih teknologi. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah menurunkan emisi sebesar 29% melalui program yang dilaksanakan secara mandiri hingga menjadi 41% apabila terdapat kerja sama dengan negara lain maupun organisasi internasional dengan kondisi tanpa ada aksi nyata (*business as usual*) pada tahun 2030.

Untuk mencapai target komitmen tersebut, Indonesia baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain, berupaya untuk melakukan tindakan untuk mengatasi efek gas rumah kaca. Tindakan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan siklus karbon adalah mengembangkan inventarisasi gas rumah kaca. Inventarisasi gas rumah kaca adalah kegiatan yang dilakukan organisasi atau pemerintah untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi.

Hasil perhitungan inventarisasi gas rumah kaca Indonesia menunjukkan total emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 4,8% total emisi dunia dengan angka 2,543 juta ton ekuivalen karbon dioksida gas rumah kaca (GgCO₂e), meningkat sebesar 1,5 juta ton dibanding tingkat emisi tahun 2000, atau mengalami peningkatan sebesar 2,9% per tahun selama periode tahun 2000-2016 (Ditjen PPI kementerian LHK, 2020). Jumlah emisi per-kapita Indonesia mencapai 9.2 ton pada tahun 2015, lebih tinggi dari emisi per-kapita rata rata dunia (7 ton) dan rata rata di Tiongkok (9 ton), Inggris (7.7 ton), dan Uni Eropa (8.1 ton) (Dune, 2020).

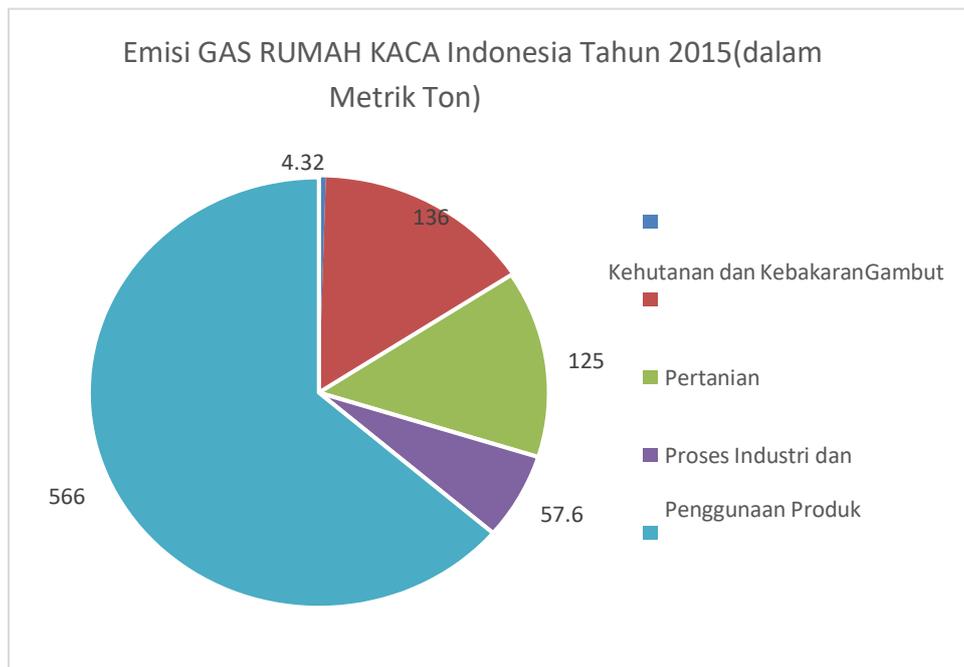
Profil emisi gas rumah kaca selama periode 2000-2016 dapat digambarkan pada grafik 1.1 di bawah ini.

Grafik 1 Data Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia tahun 2000-2016



Sumber: Laporan Inventarisasi GAS RUMAH KACA dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi 2017

Dari grafik diatas dapat terlihat setelah Indonesia bergabung dalam *Paris Agreement*, terjadi penurunan di tahun 2016. setelah lonjakan tertinggi di tahun 2015, Indonesia meredam laju emisi gas rumah kaca di tahun 2016. Sedangkan untuk emisi gas rumah kaca Indonesia pada Tahun 2015 sesuai masing-masing kategori, secara lebih detail adalah sebagai berikut:

Grafik 2 Emisi GAS RUMAH KACA Indonesia Tahun 2015

Sumber: Diolah peneliti (2021)

Grafik dan data diatas menunjukkan lonjakan terbesar pada tahun 2015 disebabkan oleh penggunaan energi yang menyumbang 566 Mt. Selanjutnya diikuti oleh limbah yang berkontribusi sebesar 136 Mt, dan pertanian sebesar 125 Mt. Proses industri dan penggunaan produk sebesar 57,6 Mt, dan terakhir kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 4,32 Mt. Dengan angka tersebut, pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat keempat dalam emisi gas rumah kaca dimana Tiongkok menempati peringkat satu, diikuti oleh Amerika Serikat dan India (PIK Postdam, 2020).

Dalam upaya penanganan emisi gas rumah kaca, Indonesia pun melaksanakan berbagai macam proyek dengan negara-negara lain melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Salah satu dari proyek tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan *United States Agency For International Development* (USAID).

USAID merupakan program president John F. Kennedy pada tahun 1961 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di negara berkembang serta memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat. Melalui USAID, Amerika Serikat memberikan bantuan pendanaan melalui kerangka kerja sama antara Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Salah satu kerja sama yang dilakukan USAID di Indonesia adalah mendanai Proyek *Indonesia Forest and Climate Support* (IFACS) yang berjalan sejak 5 November 2010 hingga 30 September 2015 (Global Waters, 2015).

USAID dan program IFACS, adalah organisasi independen dari pemerintah Amerika Serikat yang bertanggungjawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, serta bidang kemanusiaan untuk negara-negara lain untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. IFACS memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi kawasan-kawasan penting untuk pelestarian yang memiliki nilai konservasi yang tinggi. Adapun peninjauan atas kawasan-kawasan penting tersebut

merujuk pada buku panduan terkait yaitu “Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi” ([Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesiamm 2008](#)).

LESTARI adalah wujud dari kelanjutan program IFACS yang merupakan salah satu program bantuan bilateral terbesar yang mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada tahun 2020 ([LESTARI, 2019](#)). LESTARI adalah proyek manajemen hutan yang dibentuk untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta melakukan konservasi biodiversitas di ekosistem hutan dan gambut yang di dalamnya melibatkan tata kelola hutan, kerjasama dalam konservasi dan pelibatan dalam sektor swasta. LESTARI dijalankan mulai dari bulan Agustus 2015 hingga Juli 2020 dan menargetkan 6 lahan strategis di 3 kepulauan terbesar Indonesia yaitu: Lahan Leuser di Sumatra Utara, Lahan Katingan-Kayahan di Kalimantan Tengah, Lahan Sarmi dan Cyclops di Papua bagian utara serta Lahan Lorentz dan Mappi- Bouven Digoel di Papua bagian selatan ([LESTARI, 2020](#)).

Penelitian ini sendiri akan berfokus lebih dalam pada lahan Katingan-Kahayan yang berada di Kalimantan Tengah. Lahan di provinsi ini dibagi menjadi tiga wilayah biofisik, yaitu mangrove pesisir dan lahan rawa yang didominasi gambut di selatan; dataran tengah dan perbukitan rendah yang sebelumnya tertutup oleh hutan hujan tropis tetapi sebagian besar diubah menjadi pertanian, dan dan perbukitan yang lebih tinggi dan daerah pegunungan yang umumnya masih tertutup hutan dan sulit diakses.

Lanskap di Kalimantan Tengah didominasi oleh Taman Nasional Sebangau yang termasuk dalam keseluruhannya, dan lahan gambut di sekitarnya. Lahan ini juga termasuk dalam Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (BBBR). Taman ini menyediakan habitat bagi berbagai macam satwa liar dan populasi besar orangutan. Fitur dominan lainnya dari lanskap ini adalah Sungai Katingan dan Kahayan, yang memberi nama lanskap dan menyediakan konektivitas antara dua taman nasional. Lanskap operasional Lestari mencakup Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dan Gunung Mas serta Kota Palangkaraya.

Lanskap Katingan-Kahayan dipilih karena didalamnya terdapat area sebesar tiga puluh satu persen dari total lanskap yang tertutup oleh lahan gambut yang kaya akan simpanan karbon. Hal ini menjadi pertimbangan utama pemilihan lanskap oleh proyek LESTARI. Selain itu, lahan gambut yang tidak dikelola secara berkelanjutan, termasuk melalui metode mengeringkan lahan dalam skala yang besar, dapat menimbulkan kekeringan yang semakin luas ke wilayah di sekitarnya secara masif, utamanya pada musim kemarau. Hal tersebut menjadikan daerah ini menjadi daerah yang rawan karhutla, seperti yang terjadi pada tahun 2015 di mana wilayah ini mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sulit diatasi dan dikendalikan hingga menjadi bencana. Bencana tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat, yaitu perekonomian daerah terdampak menjadi terganggu dan keseimbangan alam menjadi teracancam. Kebakaran hutan juga berdampak buruk terhadap perubahan iklim dalam skala global. Pertimbangan terkait simpanan karbon di lahan gambut, pengolahan lahan gambut yang tidak berkelanjutan, serta ancaman kebakaran lahan menjadi dasar bagi proyek Lestari untuk mengelola lebih lanjut lanskap ini.

Kerangka Teori

Kerja Sama Internasional

KJ Holsti berpendapat bahwa partisipasi di seluruh dunia dapat dicirikan sebagai pandangan bahwa setidaknya dua minat, kualitas, atau tujuan bertemu satu sama lain dan

dapat memberikan sesuatu, maju atau dipenuhi oleh semua pertemuan ganda. negara lain akan membantu negara itu dengan mencapai kecenderungan dan kualitasnya, pengaturan atau masalah tertentu antara setidaknya dua negara untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau situasi yang tidak dapat didamaikan, standar resmi atau informal sehubungan dengan pertukaran di masa depan yang dilakukan untuk melakukan pengaturan, pertukaran antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988).

Bangsa-bangsa di dunia saling berhubungan satu sama lain, baik dalam struktur dua sisi maupun multilateral. Hal ini karena berbagai kondisi dan kebutuhan setiap bangsa yang ditunjukkan dengan keadaan saat ini. Untuk memenuhi keunggulan publiknya, setiap bangsa memiliki berbagai kemampuan dan kemungkinan. Hadirnya kerja sama global membuat suatu negara yang membutuhkan kemampuan serta aset bangsa yang berbeda dapat terpuaskan, melalui strategi, korespondensi, dan latihan langsung. Oleh karena itu, menjaga kolaborasi di seluruh dunia sangat penting untuk ketahanan suatu bangsa dan rutinitas hubungan ini. Selain itu, diperlukan serangkaian perencanaan agar kerja sama dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan pemahaman bersama antar bangsa.

Saat ini sebagian besar pertukaran dan hubungan antar bangsa dalam kerangka global adalah normal dan dibebaskan dari pertikaian. Semua hal dianggap sama, berbagai jenis masalah publik, teritorial, dan dunia yang telah muncul secara positif memerlukan pertimbangan dari pertemuan yang berbeda. Memperhatikan kasus-kasus yang terjadi, otoritas publik suatu negara yang terkait dengan berbagai administrasi negara untuk mengusulkan pengaturan elektif, mengatur atau memeriksa masalah utama, serta memberikan konfirmasi khusus yang berbeda untuk membantu tujuan masalah tertentu dan mengakhiri diskusi dengan membingkai kesepakatan bersama. Siklus ini biasa disebut dengan kolaborasi atau kerja sama.

Kerja sama internasional pada dasarnya memiliki bidang yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini dapat ditemukan dalam empat jenis kerja sama, yaitu: kerja sama universal/global, kerja sama regional, kerja sama fungsional, dan kerja sama ideologis. Dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional fungsional akan digunakan untuk menganalisis kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui kerangka kerja USAID-LESTARI dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, ditinjau dari fungsi dan kinerja dari LESTARI selama tahun 2015-2020 untuk melihat implementasi dari kerja sama USAID- Indonesia melalui Proyek LESTARI.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan memaparkan lebih dalam tentang bagaimana kerja sama antar USAID dan Indonesia dalam menangani emisi Gas Rumah Kaca. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan telaah pustaka dari berbagai literatur seperti buku, majalah, tabloid, jurnal, internet dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Lanskap Katingan-Kahayan terletak di Kalimantan Tengah, provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Provinsi ini dibagi menjadi tiga wilayah biofisik: mangrove pesisir dan lahan rawa yang didominasi gambut di selatan; dataran tengah dan perbukitan rendah yang sebelumnya tertutup oleh hutan hujan tropis tetapi sebagian besar diubah menjadi

pertanian; dan perbukitan yang lebih tinggi dan daerah pegunungan yang umumnya masih tertutup hutan dan sulit diakses.

Lanskap nilai di Kalimantan Tengah didominasi oleh Taman Nasional Sebangau yang termasuk dalam keseluruhannya, dan lahan gambut di sekitarnya. Ini juga termasuk bagian Kalimantan Tengah dari Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (BBBR). Kedua taman menyediakan habitat bagi berbagai macam satwa liar dan populasi besar orangutan. Fitur dominan lainnya dari lanskap adalah Sungai Katingan dan Kahayan, yang memberi nama lanskap dan menyediakan konektivitas antara dua taman nasional. Lanskap operasional ditentukan oleh Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, dan Gunung Mas serta Kota Palangkaraya.

Pengelolaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan, termasuk pengeringan yang ekstensif yang menyebabkan gambut mengering selama musim kemarau, telah membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2015, kebakaran lahan gambut dan hutan merupakan bencana dan sangat sulit untuk dipadamkan. Hal ini mengakibatkan dampak yang menghancurkan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melumpuhkan ekonomi lokal, dan menghancurkan kawasan hutan yang signifikan dan keanekaragaman hayati yang dikandungnya, sementara secara signifikan memperburuk perubahan iklim dalam skala global.

Adapun tiga program utama yang dilaksanakan di Lanskap ini, yaitu Penguatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perhutanan sosial dan pemantauan hutan, serta Pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran tertuang sebagai berikut.

A. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran

Integrated Fire and Land Management (IFLM) adalah inisiatif lanskap inti yang diterapkan di Lanskap Katingan Kahayan. Ini melibatkan peningkatan kesadaran dan advokasi dengan masyarakat dalam memahami kerugian lingkungan, kesehatan, dan ekonomi akibat kebakaran dan kabut asap. IFLM juga berfokus pada peningkatan tata kelola lingkungan dengan mengembangkan kapasitas antar instansi pemerintah dalam mencegah dan menekan kebakaran, serta memantau dan menegakkan hukum dan peraturan. LESTARI secara langsung mendukung pembasahan kembali lahan gambut dan mencegah hilangnya lebih lanjut hutan rawa sekunder akibat semak belukar dan lahan terbuka (terutama yang terjadi melalui kebakaran). Inisiatif IFLM juga mencakup pengelolaan bersama Taman Nasional Sebangau dengan WWF.

Lanskap Kalimantan Tengah yang sangat dominan di sektor lahan gambut, membuat pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran menjadi penting sekali. Emisi dihitung dengan percobaan berupa koordinasi fungsi dan tugas Bappeda yang berperan sebagai sekretariat yang membawahi GRK, membentuk tim kerja dalam proyek Lestari yang kompeten berkaitan dengan perubahan iklim. Kalteng telah mengidentifikasi setiap pemilik lahan berikut tuntutan untuk bertanggung jawab akan lahan-lahan gambut yang telah terbakar.

Di Lanskap Katingan-Kahayan dan beberapa daerah lain, api telah menjadi bagian utama dalam kegiatan pertanian dan produksi pangan, menyuburkan tanah, dan berpartisipasi dalam membuka lahan untuk dijadikan lahan produktif. Membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran hutan telah dilakukan secara masif dalam proses pembukaan kebun kelapa sawit dan perindustrian kayu. Kendati demikian, karhutla yang luas dan tidak dapat dikendalikan menjadi ancaman bagi tingkat kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat, serta memberikan tantangan besar bagi usaha konservasi alam.

Membuka dan membakar lahan secara sembarangan tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan oleh petani kecil mandiri maupun perusahaan industri kehutanan besar, mengeringkan lahan gambut, dan tidak adanya usaha pemerintah dalam memberikan tanggapan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyebab menyempitnya lahan gambut dan penurunan keanekaragaman alam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa respons dan penanganan secara masif dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat kompleks sehingga kasus-kasus karhutla dapat ditangani dengan prosedur yang sesuai.

Untuk meminimalisir dampak yang lebih jauh terhadap kesehatan masyarakat, pendekatan IFM menjadi hal yang sangat diperlukan. IFM Lestari memiliki empat dasar, yaitu: Pencegahan, Kesiapsiagaan, Respon, dan Pemulihan. Pencegahan merupakan dasar yang paling penting, hal ini dikarenakan terlibatnya dukungan dari masyarakat melalui meningkatnya kesadaran, pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan *stake holder* perlu dibangun secara solid. Hal ini memberikan gambaran bahwa titik utama bagi Lestari diantaranya membuat kesatuan antara para pembuat kebijakan, membagi pengetahuan yang berdasar pada riset mutakhir, dan menjalin kerja sama melalui dukungan terhadap pendekatan “berbagi beban” dengan IMF. Forum Multi Pihak Lestari, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyediakan wadah yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi melalui musyawarah terbuka yang membicarakan permasalahan karhutla agar diperoleh hasil yang memuaskan dan konsisten dari para pembuat kebijakan dan kepentingan terhadap cara-cara memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dan sesuai agar tetap menjaga ekosistem dan keseimbangan alam.

B. Penguatan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan bersama BBR berfokus pada peningkatan pengelolaan kawasan baik di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. LESTARI mendukung pengembangan kapasitas otoritas pengelola taman nasional untuk memantau dan mendeteksi ancaman menggunakan alat modern seperti METT.

LESTARI mendukung penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan sistem kesatuan pengelolaan hutan terkecil di tingkat terbawah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara total, LESTARI membantu 16 unit KPH di Kalimantan Tengah dengan total area kelolaan seluas 25.055 ribu hektar.

LESTARI mendampingi KPH mitra melalui lima pencapaian operasionalisasi KPH sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP),
2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD),
3. Memfasilitasi hutan kolaboratif pengelolaan melalui skema seperti perhutanan sosial,
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia KPH, dan
5. Pelaksanaan perlindungan dan keamanan kawasan hutan.

Penetapan lima tonggak tersebut didasarkan pada norma dan peraturan yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah seperti P.6/MenhutII/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Perdirjen PDASHL P.7/PDASHL/2016 tentang Standar

Operasionalisasi KPHL, dan Perdirjen PHPL P.6/PHPL/2017 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Adapun hasil dari KPH yang didukung LESTARI menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perencanaan dan penganggaran, melengkapi staf dengan keterampilan yang ditingkatkan, memfasilitasi kemitraan kolaboratif dengan masyarakat dan sektor swasta, dan pengoperasian sistem pemantauan dan perlindungan kawasan hutan terpadu menggunakan alat dan SOP.

C. Perhutanan Sosial dan Pemantauan Hutan

Penataan Ruang merupakan instrumen penting untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan penyelarasan kebijakan pemerintah di semua tingkatan dan membuka akses publik untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan penggunaan lahan. LESTARI mendorong revisi kebijakan publik tentang penggunaan lahan yang memungkinkan terjadinya deforestasi dan degradasi sambil mempromosikan strategi pembangunan rendah emisi yang menyeimbangkan tujuan konservasi dan pembangunan.

Proyek LESTARI di Lanskap Katingan-Kahayan ini berfokus untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kalimantan Tengah dalam mengoperasionalkan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Rencana Konservasi Lahan (LCP) dengan mengintegrasikan rekomendasi mereka ke dalam rencana tata ruang kabupaten, rencana pembangunan, dan proses penganggaran.

Melalui Proyek LESTARI, ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memperbaiki pengelolaan hutan, atau untuk terlibat dengan donor sektor kehutanan. Meskipun LESTARI mendukung KLHS-RPJMD di Kalimantan Tengah pada tahun 2017, LESTARI belum dapat terlibat dengan Dinas Kehutanan provinsi untuk membantu mengembangkan Rencana Strategis Kehutanan dan rencana kerja tahunan. Selama tahun 2018, LESTARI membangun keterlibatan dalam perhutanan sosial dengan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, dan terlibat langsung dengan KPH untuk mendukung peningkatan kapasitas.

Di akhir tahun 2018, LESTARI melakukan penilaian terkait peluang untuk mempengaruhi kebijakan, rencana dan anggaran tingkat provinsi untuk pengelolaan hutan. Kajian tersebut mengidentifikasi peluang untuk mendukung alokasi Dana Reboisasi untuk pencegahan kebakaran, perhutanan sosial, dan perlindungan hutan. Peluang ini didasari pada perubahan kebijakan nasional, dimana Dana Reboisasi, yang selama ini kurang dimanfaatkan dengan baik, dan terakumulasi. Dana ini kemudian dapat digunakan untuk beberapa tujuan baru, termasuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran, perlindungan hutan, dan inisiatif perhutanan sosial, termasuk dukungan untuk ekonomi desa. pembangunan melalui perhutanan sosial. Walaupun kebijakan baru di tingkat nasional telah memungkinkan untuk alokasi dana ini, pemerintah daerah pada umumnya lambat dalam memanfaatkan kesempatan ini, dan membutuhkan dukungan agar berhasil mengalokasikan kembali dana tersebut.

Provinsi Kalimantan Tengah ternyata memiliki sumber pendanaan terbesar yang tersedia, yang berjumlah lebih dari 80 juta USD, serta kebutuhan yang sangat tinggi untuk pencegahan kebakaran yang lebih baik. Situasi daerah yang kekurangan dana untuk KPH, perhutanan sosial, dan perlindungan hutan membuat sumber pendanaan ini sebagai sebuah kesempatan utama untuk membantu pemerintah provinsi dalam mengakses dana ini dan mengalokasikannya untuk masalah pencegahan kebakaran dan perhutanan sosial yang mendesak.

Sumber pendanaan ini berasal dari Dana Reboisasi (DR) yang merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH), atau dana yang dihimpun dari pemegang izin usaha kehutanan untuk memanfaatkan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu, dan dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghijauan.

Sampai dengan tahun 2016, DBH-DR dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan kemudian didistribusikan ke kabupaten-kabupaten tempat kegiatan kehutanan dilakukan. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan Dana Reboisasi mereka, antara lain karena peraturan yang ketat tentang penggunaan yang diizinkan (dalam Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2002) dan kekhawatiran bahwa pengawasan dari pemerintah pusat akan mengarah pada tuntutan pidana jika dana tidak digunakan sesuai dengan peraturan, Artinya dana cenderung menumpuk di tingkat kabupaten tanpa dimanfaatkan. Sisa Dana Reboisasi yang dikumpulkan oleh 14 pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah baru-baru ini mencapai 1.039 triliun Rupiah atau sekitar 74,6 juta USD.

Sejak tahun 2017, Dana Reboisasi didistribusikan ke pemerintah provinsi dan bukan ke pemerintah kabupaten, karena UU Pemerintah Daerah 2014 yang mengalihkan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten ke provinsi. Alokasi Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017-2018 juga kurang dimanfaatkan, dengan sisa dana sekitar 95,82 miliar Rupiah atau sekitar 6,88 juta USD⁹. Selain itu, terdapat pula alokasi Dana Reboisasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 238,81 miliar Rupiah yang juga belum dialokasikan.

Karena pembatasan penggunaan Dana Reboisasi yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002, dan jumlah dana yang tidak terpakai terus terakumulasi, pemerintah pusat memutuskan untuk memperluas kemungkinan penggunaan dana tersebut. APBN 2019 mencantumkan klausul yang memungkinkan Dana Reboisasi digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi daerah aliran sungai. Hal ini melanjutkan dari APBN 2017 dan 2018 yang juga sudah mulai memperluas penggunaan yang diizinkan. Permenkeu 230 Tahun 2017 lebih lanjut menjelaskan pemanfaatan yang diizinkan, termasuk program mitigasi perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan lestari; serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pada akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan mendorong dinas kehutanan provinsi untuk menyusun alokasi anggaran dan menyerahkan ke Jakarta untuk disetujui, tetapi rencana alokasi anggaran dari daerah tertunda, karena pemahaman sebelumnya tentang penggunaan dana yang dibatasi. Hal ini menunjukkan perlunya mitra eksternal untuk memfasilitasi penyusunan proposal alokasi Dana Reboisasi untuk mitigasi perubahan iklim, dan untuk mendukung strategi pelaksanaan pembangunan untuk dana tersebut.

Selama awal hingga pertengahan tahun 2019, Proyek LESTARI mendukung pengembangan proposal anggaran untuk mengalokasikan sebagian Dana Reboisasi di Kalimantan Tengah. Hal ini termasuk membangun komunikasi informal dengan pejabat lokal dan nasional, termasuk di Kementerian Dalam Negeri, KLHK, dan Kementerian Keuangan; mengadakan lokakarya yang melibatkan KPH dalam diskusi tentang bagaimana dana didapatkan dan harus dialokasikan, mendukung pengembangan proposal, dan memfasilitasi komunikasi antara pejabat pemerintah pusat dan provinsi untuk memecahkan masalah saat proposal melalui pemeriksaan di Jakarta. Beberapa lokakarya diadakan dengan mempertemukan perwakilan menteri, staf dari Dinas

Kehutanan, KPH, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menjelaskan proses dan persyaratan realokasi dana, mempertimbangkan praktik terbaik dalam pendekatan perhutanan sosial, pencegahan kebakaran, perlindungan hutan, dan rehabilitasi, dan kemudian para pemangku kepentingan pemerintah bersama-sama mengembangkan struktur alokasi anggaran yang diusulkan seperti pendekatan program, target, area fokus, serta biaya unit.

Sebagai hasil dari proses ini, alokasi anggaran diserahkan oleh provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah pusat sebesar Rp 63,2 miliar (USD 4,5 juta), yang mencakup kegiatan pencegahan kebakaran, pemantauan hutan, perhutanan sosial, dan rehabilitasi hutan. LESTARI memberikan bantuan teknis agar dana dapat disusun untuk menerapkan praktik terbaik dan pelajaran LESTARI tentang cara mendukung pencegahan kebakaran dan perhutanan sosial secara efektif. Alhasil, re-alokasi diajukan ke Kementerian Keuangan di Jakarta untuk mendapat persetujuan. Penerapannya harus ditingkatkan oleh beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. LESTARI telah melibatkan perwakilan dari kementerian-kementerian ini dalam lokakarya di Kalimantan Tengah, sehingga mereka dapat mengomunikasikan persyaratan dan dengan demikian memastikan persetujuan lebih cepat. Permintaan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat dan dokumentasi anggaran final dikeluarkan oleh pemerintah provinsi pada Agustus 2019. Proses serupa diulang untuk alokasi Dana Reboisasi 2020, membuka jumlah dana baru yang lebih besar (Rp 100 miliar atau USD 7,1 juta) untuk mengatasi prioritas ini. Rincian besaran dana yang diusulkan dalam rencana kegiatan Dana Reboisasi 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kesimpulan

Program USAID LESTARI merupakan program yang dilakukan untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), melestarikan keanekaragaman hayati yang berada dalam ekosistem hutan serta mangrove yang memiliki nilai biologis serta kaya akan simpanan karbon. LESTARI dibangun berdasarkan pondasi proyek USAID IFACS yang menerapkan pendekatan lanskap yaitu sebuah kerangka kerja manajemen dari tata guna lahan terintegrasi yang bertujuan untuk mensinergikan kebijakan di lintas sektor guna menyelaraskan pembangunan dan tujuan konservasi.

Pada lanskap Katingan, Kahayan terdapat beberapa program yang sudah dilaksanakan LESTARI diantaranya *Integrated Fire and Land Management (IFLM)* adalah inisiatif lanskap inti yang diterapkan di Lanskap Katingan Kahayan. Ini melibatkan peningkatan kesadaran dan advokasi dengan masyarakat dalam memahami kerugian lingkungan, kesehatan, dan ekonomi akibat kebakaran dan kabut asap. Pengelolaan bersama BBBR berfokus pada peningkatan pengelolaan kawasan baik di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. LESTARI mendukung perusahaan konsesi dalam menerapkan praktik pengelolaan terbaik, seperti penebangan berdampak rendah, sehingga keutuhan habitat hutan ini tetap terjaga. LESTARI juga mendorong revisi kebijakan publik tentang penggunaan lahan yang memungkinkan terjadinya deforestasi dandegradasi sambil mempromosikan strategi pembangunan rendah emisi yang menyeimbangkan tujuan konservasi dan pembangunan.

Daftar Pustaka

- ANNUAL REPORT. Tersedia di https://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2018/03/USAID-LESTARI_AR_Oct2015-Sept2016.pdf
- BAPPENAS. 2022. *Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral dalam Rangka Optimalisasi Sumber Pendanaan Luar Negeri Bilateral*. Diambil kembali dari Pendanaan BAPPENAS: http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=122&format=raw&Itemid=45
- Global Greenhouse Gas Emissions Data. Tersedia di <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Intended Nationally Determined Contribution Republic Of Indonesia. Tersedia di https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
- LESTARI TRANSFORMATION: BUILDING FROM IFACS. Tersedia di https://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2017/12/USAID-LESTARI_Transformation.pdf
- LESTARI: REDUCING EMISSIONS AND PRESERVING BIODIVERSITY. Tersedia di https://www.lestari-indonesia.org/wp-content/uploads/2017/12/USAID-LESTARI_Overview.pdf
- The Carbon Brief Profile: Indonesia. Tersedia di <https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia>
- U.S Department of State. 2022. *US Relations with Indonesia*. Diambil kembali dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm>
- US EPA. 2017. *Documentation for Greenhouse Gas Emission and Energy Factors Used in The Waste Reduction Model (WARM)*. Washington: US EPA.
- USAID. 2015. *Lestari: Mengurangi Emisi dan Meningkatkan Konservasi Kenaekaragaman Hayati*. Jakarta: USAID.
- USAID. 2018. *Panduan Penyusunan RKP dan APB Desa Hutan Berkelanjutan*. Jakarta: USAID LESTARI.
- USAID. 2022. *About USAID*. Diambil kembali dari <https://www.usaid.gov>
- USAID. 2022. *Economic Growth and Trade*. Diambil kembali dari Diakses melalui: <https://www.usaid.gov/what-we-do/economic-growth-and-trade>
- USAID. 2022. *Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia-Amerika Serikat 2014-2018*. Diambil kembali dari <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Indonesia%20DCS%20Final%20Version%20%28Indonesian%29.pdf>
- What are the greenhouse gas changes since the Industrial Revolution?. Tersedia di <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>